
REVOLUSI BIRU: NESTAPA NELAYAN DI MUNCAR BANYUWANGI PADA MASA ORDE BARU

Moch Sholeh Pratama¹

¹Universitas Gadjah Mada

mochsholehpratama@mail.ugm.ac.id

Abstract:

The New Order under Suharto's leadership paid serious attention to the maritime sector, which has abundant resources. This attention was demonstrated through the implementation of the Blue Revolution policy, which aimed to modernise fishing equipment in order to increase fish catch productivity, which in turn would improve the welfare of fishermen. Banyuwangi, as one of the regions with abundant maritime resources, particularly in the waters of Muncar, was not exempt from the implementation of the Blue Revolution policy during the New Order era. This article was written using historical research methods, utilising contemporary publications and relevant scientific literature. The results of the study show that the Blue Revolution policy in Muncar, Banyuwangi ultimately failed and caused a series of problems, ranging from overfishing to structural poverty among the fisher community.

Keywords: Banyuwangi, Blue Revolution, Maritime, Muncar

Abstrak

Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto memberikan perhatian serius terhadap sektor maritim yang memiliki sumber daya melimpah. Perhatian ditunjukkan melalui penerapan kebijakan Revolusi Biru yang bertujuan untuk memodernisasi alat tangkap ikan yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas tangkapan ikan, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya maritim melimpah, khususnya di perairan Muncar tak luput dari implementasi kebijakan Revolusi Biru pada masa Orde Baru. Artikel ini dikerjakan menggunakan metode penelitian sejarah dengan memanfaatkan publikasi sezaman dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi mengalami kegagalan pada akhirnya dan menimbulkan sederet permasalahan mulai dari *overfishing* sampai kemiskinan struktural di kalangan masyarakat nelayan.

Kata Kunci: Banyuwangi, Maritim, Muncar, Revolusi Biru

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang melimpah. Pamor tersebut setidaknya bisa dilihat dari luasnya lahan pertanian dan banyaknya petani serta luasnya kawasan laut dan banyaknya nelayan di Indonesia. Secara historis, pada masa Orde Baru baik sektor agraris maupun sektor maritim memperoleh perhatian yang sangat serius. Perhatian tersebut ditunjukkan dengan digulirkannya kebijakan Revolusi Hijau dan Revolusi Biru oleh

pemerintah. Dalam pengetahuan umum, kebijakan Revolusi Biru tidak sefamiliar Revolusi Hijau. Padahal kebijakan Revolusi Biru kala itu juga mengusung tujuan mulia, yakni untuk meningkatkan produktivitas tangkapan ikan sama seperti Revolusi Hijau yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan di sektor pertanian. Menurut Eddy & Wahyuni (2018), salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak populernya Revolusi Biru adalah kegagalan proyek tersebut dalam meningkatkan taraf kesejahteraan para nelayan (Eddy & Wahyuni, 2019).

Pada dasarnya, Revolusi Biru bertujuan untuk mengelola air secara komprehensif. Kendati ditopang oleh kemajuan teknologi, tetapi tetap krusial untuk menjaga kelestarian ekologi dan utamanya air sebagai salah satu aset yang sangat berharga bagi manusia. Dengan demikian, hasil dari revolusi tersebut adalah rencana, desain dan strategi baru untuk manajemen tanah dan pengelolaan air secara berkelanjutan untuk memastikan kelestariannya (Celder, 2005). Namun, kebijakan Revolusi Biru pada masa Orde Baru yang berfokus pada modernisasi alat tangkap ikan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan justru menunjukkan wajah eksploitatif yang mengabaikan aspek kelestarian air dan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Menurut Kusnadi (2000), Revolusi Biru merupakan bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani tambak di kawasan pesisir. Secara teknis, Revolusi Biru adalah kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap ikan sebagai pengganti peralatan tangkap ikan tradisional yang digunakan oleh para nelayan pada era sebelumnya, yakni sekitar 1950-an. Dalam aspek permodalan dan distribusi serta pemasaran, pemerintah juga memberikan dukungan fasilitas kepada masyarakat berupa Koperasi Unit Desa Mina (KUDM) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Kusnadi, 2000). Kebijakan Revolusi Biru berpijak kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I yang berlaku selama kurun waktu 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974 (Ricklefs, 2005). Sejak 1970-an, kebijakan Revolusi Biru secara resmi diterapkan di seluruh Indonesia.

Salah satu daerah yang merasakan dampak kebijakan Revolusi Biru adalah Banyuwangi. Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Jawa memiliki garis pantai sepanjang 282 km yang membentangi sebelas kecamatan dengan rincian tiga kecamatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, tujuh kecamatan berbatasan dengan Selat Bali, dan satu kecamatan berbatasan dengan Laut Jawa (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2013). Oleh karena itu, Banyuwangi sebagai daerah pesisir memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Lebih spesifik, daerah pesisir Banyuwangi yang merupakan kantong profesi nelayan dan tercatat memiliki produksi perikanan dalam jumlah besar adalah Muncar. Muncar memiliki sejarah panjang sebagai penghasil ikan laut terbesar di Jawa yang mengalami perkembangan pesat sejak 1920-an, tepatnya ketika nelayan asing dari Jepang dan Belanda mulai masif melakukan eksploitasi (Nawiyanto, 2007). Menurut data resmi pemerintah, pada 1986, nelayan Muncar berhasil memproduksi sebanyak 2.928,9 ton tangkapan ikan (Suprpti (*ed*), 1991). Sementara itu, pada 1988 terdapat 10.144 orang yang berprofesi sebagai Nelayan di Muncar (Kecamatan Muncar, 1988). Data statistik tersebut menunjukkan bahwa Muncar merupakan daerah yang didiami kultur masyarakat maritim yang menggantungkan hajat hidupnya terhadap hasil tangkapan ikan di laut. Berdasarkan uraian tersebut, lantas muncul pertanyaan: Bagaimana pengaruh Revolusi Biru terhadap sektor perikanan dan kesejahteraan ekonomi nelayan di Muncar?

Diketahui terdapat sejumlah literatur yang mengkaji tentang eksploitasi perikanan laut dan kebijakan revolusi biru. Artikel Semedi (2005), menguraikan bahwa menipisnya stok ikan di Laut Jawa, khususnya pesisir utara Jawa disebabkan oleh penangkapan ikan yang tak terkontrol dan tidak memperhatikan kelestarian sumber daya ikan (Semedi, 2005). Artikel Nawiyanto (2018), menyoroti

eksploitasi perikanan laut di Karesidenan Besuki oleh nelayan Belanda dan Jepang dengan menggunakan teknologi modern telah meningkatkan jumlah tangkapan ikan, sehingga mentransformasi Besuki dari pengimpor menjadi pengekspor ikan laut. Salah satu kasus yang diteliti adalah kawasan perairan Muncar yang merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia (Nawiyanto, 2018). Penelitian Himmah (2021), berfokus pada kehidupan nelayan yang mengalami pasang surut ketika penerapan kebijakan Revolusi Biru. Dinamika kehidupan sosial ekonomi nelayan terjadi karena tidak semua nelayan mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dan fasilitas yang disediakan pemerintah, sementara sebagian nelayan kukuh ingin mempertahankan penggunaan alat tangkap tradisional (Himmah, 2021).

Artikel ini dikerjakan dengan menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo yang meliputi pemilihan topik, penelusuran sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah (historiografi) (Kuntowijoyo, 2013). Artikel ini ditulis dengan memanfaatkan publikasi sezaman koran dan laporan resmi pemerintah dan literatur ilmiah yang relevan. Koran seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Surabaya Post, Liberty, Sains Populer Fakta diperoleh di Perpustakaan Medayu Agung dan situs web Monumen Pers Nasional. Sementara itu, laporan resmi pemerintah berupa data statistik diperoleh dari situs web BPS Jawa Timur dan Banyuwangi. Kritik sumber terhadap koran-koran dilakukan dengan mengeliminasi narasi yang berupaya menyembunyikan fakta kemiskinan akibat menipisnya stok ikan di perairan Muncar, karena berlawanan dengan realitas faktual kala itu. Artikel ini menjelaskan penerapan kebijakan Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi dan menguraikan praktik *overfishing* yang menjadi salah satu penyebab masyarakat nelayan di sana terjebak ke dalam kemiskinan struktural dan merupakan akumulasi dari kegagalan penerapan kebijakan Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi.

Artikel ini mengkaji kebijakan Revolusi Biru yang membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Aspek *overfishing* dan kemiskinan struktural belum dibahas secara spesifik dan mendalam oleh penelitian terdahulu sebagai imbas dari kegagalan kebijakan Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi. Oleh karena itu, artikel ini berkontribusi terhadap deskripsi praktik tangkap ikan yang sekadar mengejar hasil besar jangka pendek dan mengorbankan keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Muncar. Kelangkaan stok ikan tersebut lantas justru membawa petaka kemiskinan di kalangan nelayan. Alat tangkap modern yang dimiliki pada akhirnya bukan menjadi sumber kesejahteraan melainkan jembatan menuju kemiskinan.

Hasil dan Pembahasan

Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi: Produksi dan Distribusi

Pada awal 1970-an, kebijakan Revolusi Biru (*Blue Revolution*) yang diterapkan pemerintah Orde Baru menandai episode baru pembangunan di sektor penangkapan ikan laut. Orde Baru yang menekankan pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi, telah mendorong modernisasi perikanan dengan mekanisasi dan penggunaan alat tangkap yang canggih sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Selain alat produksi, fasilitas lembaga ekonomi untuk penyediaan permodalan dan pemasaran hasil tangkapan ikan juga diberikan melalui pembangunan KUD Mina dan TPI di desa-desa nelayan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan laut yang pada gilirannya mampu mentransformasi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Di sisi lain, kebijakan ini mengabaikan aspek kelestarian ekosistem laut dan kemampuan adaptasi masyarakat nelayan yang beragam; pro kontra (Kusnadi, 2016).

Menurut Kusnadi (2003), kebijakan Revolusi Biru mulai diimplementasikan di Muncar, Banyuwangi pada 1974 yang ditandai dengan timbulnya gejolak sosial di kalangan nelayan Muncar.

Gejolak yang timbul disebabkan oleh polarisasi dua kubu nelayan yang pro modernisasi perikanan dan yang bersikukuh mempertahankan penggunaan alat tangkap ikan tradisional. Menurut laporan Kompas, sekitar 2000 masyarakat pro modernisasi perikanan melakukan aksi pengrusakan peralatan tangkap ikan tradisional karena sebagian besar nelayan di Muncar enggan menerima modernisasi peralatan tangkap ikan (jaring *purse seine*) dan motorisasi perahu (Kompas, 3 Oktober 1974). Kendati terjadi gesekan hebat diantara para nelayan, pemerintah tetap menjalankan proyek Revolusi Biru di Muncar.

Menurut Himmah, terdapat peranan M. Noer, Gubernur Jawa Timur dibalik meredanya konflik horizontal antar nelayan Muncar. Pada 1975, M. Noer melakukan dialog dengan sejumlah nelayan Muncar yang menolak adanya modernisasi peralatan tangkap ikan. Hasilnya, nelayan yang sempat menolak pada akhirnya menerima dengan catatan ada pembagian kerja yang jelas antara pencari dan pengolah ikan serta dukungan material untuk kepentingan produksi yang berkeadilan. Kebijakan yang berkeadilan adalah tuntutan nelayan guna menghindari ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang disediakan oleh pemerintah (Himmah, 2021). Pada 1976, distribusi peralatan tangkap modern pun dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dengan melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Jawa Timur sebagai pemberi kredit. Sebanyak 50 unit jaring *purse seine* dan satu unit perahu bermesin diberikan kepada nelayan. Selain itu, para nelayan juga diberikan akses modal pembelian perahu bermesin dengan skema kredit perbankan (Himmah, 2021).

Penerapan kebijakan Revolusi Biru dalam perkembangannya memberikan dampak dalam rupa peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan perahu bermesin di kalangan nelayan Muncar. Diketahui bahwa pada awal 1970-an, jumlah nelayan di Banyuwangi sebanyak 12.000 orang dengan mayoritas beroperasi di perairan Muncar (Nawiyanto, 2018). Menurut laporan Sains Populer Fakta, dari yang semula hanya 188 perahu bermesin yang digunakan pada 1975 menjadi melonjak 1058 perahu pada 1980 yang digunakan oleh nelayan di Muncar pada 1980. Peningkatan penggunaan perahu bermesin selain menunjukkan penerimaan nelayan tempatan terhadap kebijakan modernisasi perikanan, juga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menanamkan kapitalnya untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Masih dalam surat kabar yang sama, dilaporkan juga terjadi peningkatan penggunaan alat tangkap modern dan penurunan alat tangkap tradisional oleh nelayan Muncar. Misalnya pada 1975 jaring *purse seine* yang semula hanya 44 unit, melonjak menjadi 175 unit pada 1980 dan *payang oras* yang pada 1975 hanya sebanyak 380 unit, merosot tajam tinggal 134 unit pada 1980.

Sayangnya, peningkatan penggunaan perahu bermesin dan alat tangkap modern oleh nelayan Muncar tidak berbanding lurus dengan produktivitas hasil tangkapan ikan. Dilaporkan bahwa hasil tangkapan ikan segar pada awal penerapan Revolusi Biru sempat mengalami peningkatan, tetapi kemudian terus mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun. Pada 1975, nelayan mencatatkan produksi 28.172 kg dan meningkat sekitar dua kali lipat, yakni sebanyak 67.115 kg ikan segar pada 1976. Produksi gemilang pada 1976 tidak bisa dipertahankan alih-alih meningkatkan pada tahun-tahun berikutnya, karena produksi ikan segar terus menurun. Pada 1980, nelayan Muncar hanya mampu memproduksi 14.924 kg ikan segar, sedikit lebih baik dari 1978 yang sempat mencatatkan produksi 10.508 kg (Sains Populer Fakta, Januari 1982). Sejak 1960-an, lemuru adalah jenis ikan yang paling banyak ditangkap oleh nelayan di perairan Muncar, jumlahnya mencapai 70% dari total tangkapan ikan nelayan di sana (Nawiyanto, 2018).

Berdasarkan laporan di atas, maka diketahui bahwa kebijakan Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi hanya sukses mengarahkan nelayan untuk menggunakan alat-alat tangkap modern, tetapi gagal dalam memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa

tersebut secara berkelanjutan. Peningkatan produksi hanya terjadi pada dua tahun awal penerapan kebijakan modernisasi perikanan dan setelah itu tak pernah terjadi stabilitas jumlah produksi. Faktor kondisi alam (musim), keberadaan industri pengalengan ikan, dan penggunaan jenis alat tangkap mempengaruhi ketersediaan ikan di perairan muncar. Pencemaran lingkungan membuat ikan-ikan di Muncar kian menjauh, permintaan yang tinggi dari industri pengalengan dan penggunaan alat tangkap modern yang mengarah ke *overfishing* menjadi penyebab fluktuasi bahkan kecenderungan penurunan produksi tangkapan ikan segar di Muncar, Banyuwangi (Juliansyah, 2023).

Di samping aspek produksi, kebijakan Revolusi Biru juga mengafirmasi nelayan dalam aspek distribusi. Hasil tangkapan ikan nelayan Muncar selain dijual secara langsung dalam rupa ikan segar, juga didistribusikan ke pabrik pengolahan ikan (pengalengan) yang mulai menjamur pada 1970-an dan pada akhir rezim Orde Baru jumlahnya tercatat mencapai 27 pabrik pengolahan ikan dengan jenis produksi yang meliputi pengalengan ikan, tepung ikan, pengawaten ikan, ikan pindang, dan ikan asin (BPS Jawa Timur, 1995). Di Muncar terdapat sejumlah pabrik pengalengan seperti PT. Blambangan Raya, Sumber Nyala, PT. Maya Muncar, Sari Laut, NV. Muncar, dan Pabrik H.S. Sementara itu, juga ada pabrik pengolahan tepung ikan, seperti Pabrik *Fishing* dan Sumber Jaya Murni (Suprapti (ed), 1991). Pabrik ikan pindang secara umum dimiliki secara perorangan, seperti H. Asnawi, H. Hamid dan H. Burhanuddin. Pada 1984, nelayan tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku ikan segar pabrik-pabrik di Muncar. Ketidakkampuan itu dikarenakan telah menipisnya stok ikan dan murahnya harga ikan di musim ramai tangkapan, sehingga membuat nelayan tidak mampu mengganti biaya operasional produksi selama melaut. Kondisi serba sulit tersebut mendorong pabrik-pabrik di Muncar membeli bahan baku ikan segar dari luar negeri yakni Jepang demi memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya (Surabaya Post, 4 Januari 1984). Aksi pabrik-pabrik yang tidak berpihak kepada para nelayan pada gilirannya telah menambah kesengsaraan ekonomi nelayan di Muncar.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan bantuan fasilitas pendirian lembaga ekonomi seperti KUD Mina dan TPI (Susilo, 2010), untuk mempermudah akses permodalan dan pemasaran ikan segar tangkapan nelayan Muncar kepada konsumen. Keberadaan lembaga ekonomi tersebut diproyeksikan mampu memperlancar aktivitas ekonomi nelayan Muncar. Namun, alih-alih menjadi jalan terang dan solusi bagi para nelayan, kedua lembaga tersebut justru menimbulkan banyak permasalahan pada akhirnya. KUD Mina yang berperan dalam penyaluran kredit, fasilitas bengkel, penyediaan solar, penyediaan alat tangkap ikan, perahu dan mesin diesel bertujuan untuk menghilangkan peran para tengkulak, justru kerap kali menyengsarakan para nelayan (Suprapti (ed), 1991). Dalam perjalanannya, KUD Mina menyalurkan banyak alat tangkap ikan *purse seine* kepada para nelayan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan alat tersebut. Benar saja bahwa pada 1977, para nelayan yang sempat menikmati buah manis peningkatan hasil tangkapan harus kembali gigit jari, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan *purse seine*. Pembatasan dilakukan karena muncul fenomena lonjakan signifikan penggunaan alat tangkap modern tersebut di kalangan nelayan yang mengakibatkan *overfishing* (Sains Populer Fakta, Januari 1982). Aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan telah menyebabkan populasi ikan menurun drastis di beberapa titik. Hal ini terlihat jelas dari data hasil tangkapan ikan di Muncar yang beberapa tahun setelah penerapan kebijakan Revolusi Biru tak pernah stabil bahkan cenderung mengalami penurunan cukup signifikan. Kenaikan jumlah tangkapan bisa terjadi dengan memperluas jangkauan ke laut lepas yang jauh, tetapi sering kali terbentur modal nelayan yang tidak memadai.

TPI yang berperan sebagai lembaga pemasaran ikan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para nelayan. Dalam pemanfaatan TPI sebagai tempat transaksi jual beli, nelayan

selaku penjual dan pengusaha pengolahan ikan sebagai pembeli dikenakan retribusi sebesar lima persen. Namun dalam praktiknya, para pengusaha enggan mengeluarkan biaya tambahan, sehingga beban retribusi dilimpahkan sepenuhnya kepada para nelayan. Naasnya, TPI memungut retribusi dua kali lipat dari jumlah resmi yang ditetapkan pemerintah dengan alasan untuk kebutuhan dana pendidikan empat persen dan dana kesehatan satu persen (Liberty, 11 Februari 1984). Penyimpangan yang dilakukan oleh TPI dalam perkembangannya mendorong mayoritas para nelayan untuk menjualnya secara mandiri kepada para pengecer, karena tidak banyak potongan dan cenderung dihargai lebih mahal (Himmah, 2021).

Dengan demikian, penerapan kebijakan Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi cenderung lebih banyak menimbulkan persoalan sosial ekonomi daripada kebermanfaatannya. Mulai dari konflik horizontal antar nelayan, menipisnya stok ikan hingga pungutan retribusi yang sarat penyelewengan. Spirit “modernitas” di sektor perikanan bak bom waktu bagi para nelayan, karena kehadiran alat tangkap yang canggih justru mengakibatkan *overfishing* yang dalam perkembangannya menyusahkan para nelayan dalam menangkap ikan. Kehadiran pabrik-pabrik pengolahan ikan yang tidak bertanggung jawab terhadap limbahnya telah mencemari perairan, sehingga menyebabkan ikan-ikan semakin menjauh dari Muncar. Selain itu, sejumlah pabrik enggan menjadi mitra strategis bagi para nelayan yang ditunjukkan dengan tindakan yang tidak tertib terhadap aturan retribusi TPI. Akhirnya kehadiran “negara” di pesisir selatan Banyuwangi justru menjerumuskan nelayan ke dalam jurang kemiskinan dan permasalahan pelin, alih-alih menjadi solusi yang memberdayakan dan menyejahterakan para nelayan.

Dari *Overfishing* Hingga Kemiskinan Struktural

Kebijakan Revolusi Biru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas perikanan laut pada akhirnya berujung nestapa bagi nelayan di Muncar. Alih-alih memberikan kesejahteraan sosial ekonomi, kebijakan Revolusi Biru di Muncar justru menjerumuskan nelayan ke jurang ketergantungan dan kemiskinan struktural serta praktik *overfishing*. Pada akhirnya, penerapan kebijakan modernisasi perikanan di tengah kehidupan masyarakat nelayan Muncar justru mewariskan banyak persoalan pelik. Padahal sebelumnya, para nelayan telah menghadapi persoalan tahunan seperti perubahan iklim dan cuaca buruk serta pendangkalan pesisir yang mengganggu produktivitas dan proses penangkapan ikan.

Modernisasi perikanan di Muncar pada akhirnya menorehkan dampak negatif—tanpa bermaksud menegasikan dampak positif yang sempat dirasakan berupa lonjakan hasil tangkapan ikan—bagi sektor perikanan dan masyarakat nelayan. Dalam praktiknya, akses permodalan dengan skema kredit untuk pembelian peralatan tangkap ikan tidak terdistribusikan secara merata, kendati disalurkan secara masif oleh KUD Mina. Alhasil, nelayan yang tidak mendapatkan jatah tersebut terpaksa melakukan modernisasi peralatan tangkap ikannya melalui skema hutang kepada rentenir yang pada gilirannya memunculkan problem lainnya. Sejumlah nelayan harus terlilit hutang dengan bunga yang besar, sedangkan penghasilan dari hasil melaut tidak cukup menutup angsuran sesuai tenggat. Dalam tahap distribusi, para pedagang ikan tidak lagi dipandang sebagai variabel penting oleh para nelayan yang telah menggunakan alat-alat tangkap ikan modern. Karena para nelayan tersebut sudah bisa langsung menjualnya kepada pabrik tanpa lewat tangan para pedagang atau pengecer lagi. Dengan kata lain, ada satu jaringan ekonomi yang terputus akibat dari modernisasi perikanan ini (Kompas, 21 Oktober 1974). Para pedagang atau pengecer ikan cenderung membeli ikan segar kepada para nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tradisional. Dalam perkembangannya, relasi ekonomi antara nelayan tradisional dengan pedagang ikan justru yang berjalan berkelanjutan,

sedangkan hubungan nelayan modern dengan pengusaha pengolahan ikan kerap kali timbul dinamika pelik yang disebabkan monopoli harga. Dalam konteks ini, peranan TPI kurang terlihat karena sistem yang diterapkan tidak dikehendaki oleh para nelayan secara umum.

Teknologi jaring *purse seine* yang sempat disalurkan kepada nelayan di Muncar oleh pemerintah dalam perkembangannya menjadi bumerang bagi ketersediaan sumber daya ikan di laut. Karena jaring *purse seine* yang terbukti mampu membantu mendongkrak jumlah produksi tangkapan ikan nelayan telah mendorong para nelayan untuk berbondong-bondong menggunakannya, sehingga pemanfaatan teknologi tersebut menjadi tidak terkendali. Oleh karena sebab itu, praktik *overfishing* dengan menggunakan jaring *purse seine* menjadi tidak terhindarkan. Karena itu, Pemkab Banyuwangi bersama Pemda Bali dan Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan penggunaan jaring *purse seine* oleh nelayan demi menjaga kelestarian dan ketersediaan ikan di perairan Muncar (Sains Populer Fakta, Januari 1982).

Bergulirnya SKB tersebut tentu kontradiktif dengan bantuan jaring *purse seine* yang sempat disalurkan oleh Pemkab Banyuwangi bersama BPD Jawa Timur. Kontradiksi tersebut selain menunjukkan secara gamblang ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan Revolusi Biru di Muncar, juga membuktikan minimnya analisis terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kebijakan modernisasi perikanan, khususnya terkait penggunaan alat tangkap ikan modern. Akibat paling buruk dari kebijakan tersebut adalah kian banyaknya nelayan yang kehilangan mata pencaharian, sehingga mendorong mereka melakukan beragam cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang diberitakan oleh Bisnis Indonesia pada 1987, karena limbah industri dan kimia, pembatasan alat tangkap modern, dan berkurang drastisnya ketersediaan sumber daya ikan di perairan Muncar, maka rumah tangga para nelayan harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Bapak-bapak lebih disibukkan memperbaiki jaring *purse seine* yang rusak, pemuda dan anak-anak membantu orang tua mereka menjemur ikan-ikan kecil untuk dijadikan ikan asin, dan ibu-ibu terus memproduksi wadah ikan pindang meski permintaan rendah (Bisnis Indonesia, 24 April 1987).

Secara umum, kebijakan Revolusi Biru di Muncar pada akhirnya berujung kegagalan. Modernisasi perikanan yang digadang-gadang menjanjikan kesejahteraan ekonomi, justru berkontribusi terhadap rusaknya ketersediaan sumber daya ikan di laut akibat maraknya praktik *overfishing*. Dampak buruk lainnya adalah ketergantungan para nelayan dengan teknologi tangkap ikan modern, sehingga banyak yang terjerat hutang kepada rentenir karena butuh modal cepat untuk memodernisasi alat produksi, sedangkan ketersediaan ikan semakin terbatas dan menipis serta ada larangan pembatasan penggunaan alat tangkap modern. Apalagi, ikan segar hasil tangkapan nelayan dari waktu ke waktu mengalami kemerosotan harga karena monopoli pabrik pengolahan ikan, sehingga kian sulit bagi nelayan untuk balik modal alih-alih memperoleh untung besar dari aktivitas melautnya.

Muara dari akumulasi dampak negatif kebijakan Revolusi Biru di Muncar adalah kemiskinan struktural yang dialami oleh para nelayan. Kemiskinan struktural secara umum disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya dan struktur sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan (Suyanto, 2001). Dalam konteks kehidupan nelayan, kemiskinan struktural yang dialami merupakan faktor non alamiah yang berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya jejaring pemasaran, malfungsinya koperasi nelayan, dan dampak negatif dan destruktif penerapan kebijakan Revolusi Biru (modernisasi perikanan) (Kusnadi, 2002). KUD Mina, TPI, pabrik pengolahan ikan, dan kebijakan Revolusi Biru

menjadi penyebab nelayan Muncar terjebak ke dalam jurang kemiskinan struktural. Disfungsi, penyimpangan dan inkonsistensi KUD Mina dan TPI telah memperlebar disparitas sosial ekonomi di kalangan nelayan. Selain itu, pabrik pengolahan ikan dalam perkembangannya memonopoli harga dan mencemari lingkungan yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan. Kebijakan Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi secara umum telah menciptakan struktur sosial ekonomi yang menyebabkan para nelayan terjatuh ke dalam kemiskinan struktural. Dari fakta hidup tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemerintah pusat maupun daerah pada prinsipnya tidak memiliki keseriusan dan konsistensi untuk menjadikan sektor perikanan sebagai sumber kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat nelayan.

Kesimpulan

Rezim Orde Baru masif menggenjot pembangunan nasional yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Salah satu upayanya melalui penerapan kebijakan Revolusi Biru atau modernisasi perikanan. Revolusi Biru mengusung misi meningkatkan efektivitas dan produktivitas hasil tangkapan ikan laut yang pada gilirannya diproyeksikan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Kebijakan Revolusi Biru mulai diterapkan di Muncar, Banyuwangi pada 1974 yang ditandai gejolak sosial di kalangan nelayan. Para nelayan terbelah ke dalam dua kubu, yakni pro dan kontra terhadap kebijakan modernisasi perikanan. Konflik horizontal nelayan mampu diredam pemerintah daerah, sehingga kebijakan tersebut segera bisa diterapkan. Para nelayan perlahan mulai menggunakan alat tangkap modern dan perahu bermesin ketika melaut menangkap ikan. Pada tahun-tahun awal, jumlah hasil tangkapan ikan naik signifikan dan membuat nelayan sumringah. Alhasil, semakin banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap modern (*purse seine*). Namun, kebahagiaan yang dirasakan nelayan tidak bertahan lama karena pemerintah melakukan pembatasan izin penggunaan *purse seine*. Pembatasan dilakukan untuk menekan tingginya penggunaan alat tangkap modern tersebut yang menyebabkan situasi *overfishing*. Kondisi itu secara jangka panjang sangat merugikan para nelayan karena mengalami kesulitan menangkap ikan sebab stok ikan menipis. Belum lagi menjamurnya pabrik pengolahan ikan yang membuang limbah secara tidak bertanggung jawab, turut memperparah situasi kelangkaan ikan di perairan Muncar.

Sementara itu, kehadiran lembaga ekonomi produk kebijakan Revolusi Biru, yakni KUD Mina dan TPI dalam operasionalisasinya menyimpang dari tujuan idealnya. KUD Mina gagal menjadi penyalur modal dan alat produksi yang berkeadilan bagi nelayan, karena sebagian nelayan masih terlilit hutang kepada rentenir. Selain itu, penyaluran izin penggunaan jaring *purse seine* yang sporadis telah menyebabkan *overfishing* yang pada akhirnya sangat merugikan para nelayan. TPI yang diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan justru bersekongkol dengan para pabrik pengolahan ikan dengan membebaskan mereka dari beban retribusi jual beli. Nelayan harus membayar beban retribusi secara penuh ditambah pungutan liar TPI dengan dalih untuk dana kesehatan dan pendidikan. Alhasil sebagian nelayan memilih menjual hasil tangkapan ikan kepada pedagang ikan eceran dan sebagian lainnya menjualnya secara langsung kepada pengusaha pengolahan ikan. Dengan demikian, eksistensi TPI tidak begitu dirasakan manfaatnya oleh nelayan di Muncar.

Pada akhirnya, kebijakan Revolusi Biru gagal menghadirkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi para nelayan di Muncar, Banyuwangi. Justru, fenomena *overfishing* dan pencemaran lingkungan oleh pabrik pengolahan ikan telah membuat stok ikan di perairan Muncar menipis. Para nelayan menjadi korban dari kebijakan yang inkonsisten dan menegasikan kelestarian ekosistem laut, sehingga ketika rezim Orde Baru tumbang pada 1998 yang disertai krisis sosial, ekonomi dan politik, nasib para nelayan di Muncar jauh dari imajinasi kesejahteraan. Alih-alih memperbaiki taraf kehidupan nelayan, Revolusi

Biru justru merusak sumber pendapatan ekonomi nelayan di Muncar. Atas nama modernitas, para nelayan memang mampu meningkatkan produksi tangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap modern, tetapi dampak yang ditimbulkan sangat merusak hingga menyebabkan menipisnya stok ikan di perairan Muncar. Akhirnya para nelayan di Muncar tak pernah menikmati kesejahteraan sosial ekonomi, mereka terus berada dalam kenestapaan hidup yang penuh kesulitan. Alhasil, artikel ini menunjukkan bahwa ambisi pembangunan dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang tidak berbasis kajian komprehensif dan mengabaikan dampak lingkungan pasti menimbulkan sederet permasalahan. Kegagalan penerapan kebijakan Revolusi Biru di Muncar, Banyuwangi adalah salah satu contohnya.

Referensi

- 1400 Nelayan Muncar Kehilangan Pekerjaan. (1982, Januari Akhir). *Sains Populer Fakta*.
- BPS Jawa Timur. (1995). *Direktori Industri Pengolahan Jawa Timur 1995*. BPS Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (1997). *Survey Tahunan Perusahaan Industri: Direktori Industri Besar Sedang Jawa Timur 1997*. BPS Jawa Timur.
- Banyak Gejala Ke-tidak-puasan terhadap Modernisasi Perikanan yang Tidak Merata. (1974, Oktober 21). *Kompas*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. (2013). *Jawa Timur Sumbang Sektor Perikanan Nasional*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Di Musim Panen Harga Ikan di Muncar Merosot. (1984, Januari 4). *Surabaya Post*.
- Edi Susilo. (2010). *Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*. Universitas Brawijaya Press.
- Eddy, I. W. T., & Wahyuni, A. A. A. R. (2019). Revolusi Biru dan Human Security Nelayan Di Kusamba Klungkung. *Pustaka: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 19(1), 51-55. <https://doi.org/10.24843/PJIB.2019.v19.i01.p09>.
- Himmah, I. F. (2021). Penerapan Revolusi Biru dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Banyuwangi 1974-1999. [Undergraduate Thesis]. Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108052>
- Ian R. Celder. (2005). *Blue Revolution: Integrated Land and Water Resources Management (2nd edition)*. Earthscan.
- Juliansyah, M. R. (2023). Dampak Limbah Industri Pengolahan Ikan Terhadap Lingkungan di Muncar, Banyuwangi, 1970-2017. *Lembaran Sejarah*, 19(2), 152-66. <http://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.88726>.
- Kecamatan Muncar. (1998). *Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian Pokok Per Desa Di Kecamatan Muncar Tahun 1988*. Kecamatan Muncar.
- Kerusuhan di Muncar Rugikan Rp. 99,5 Juta. (1974, Oktober 3). *Kompas*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kusnadi. (2000). *Nelayan: Strategi Jaringan Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. LkiS.
- Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. LkiS.
- Kusnadi. (2016). Kelangkaan Sumber Daya Perikanan dan Kemiskinan Nelayan: Akibat Penetrasi Kapitalisme atau Praktek Kebudayaan? *Prosiding Science-Technology Based Marine and Fisheries Development for Sustainability*. (pp. 249-254). Program Studi Ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura. <https://ilmukelautan.trunojoyo.ac.id/prosiding-semnaskel-2016/>

- Laporan Daerah Banyuwangi: Nasib Nelayan Muncar. (1984, Februari 11). *Liberty*, 1584.
- Merle Calvin Ricklefs. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Nawiyanto. (2007). Environmental Change in A Frontier Region of Java: Besuki, 1870-1970. [PhD-Thesis]. Australian National University. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1885/147068>.
- Nawiyanto. (2018). Fish Resource Exploitation in the Besuki Region During The Pre-New Order Period. *Proceedings of the International Conference on Social Science and Character Educations (IcoSSCE 2022)* (pp. 74-79). Atlantis Press SARL. <http://dx.doi.org/10.2991/icosce-icsmc-18.2019.14>
- Nelayan Muncar Kehabisan Ikan. (1987, April 24). *Bisnis Indonesia*.
- Semedi, P. (2025). Depletion of the Java Seas Fish Stock 1860s-1990s. *Humaniora*, 17(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/jh.823>.
- Suprpti (ed). (1991). *Kehidupan Masyarakat Nelayan di Muncar (Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, XIV(4), 45-42. https://journal.unair.ac.id/filerPDF/_3_%20Bagong.pdf.